

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI DINAS PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN MALINAU

CHRISTOPHER

Mahasiswa Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi Negara
Universitas Mulawarman

ABSTRACT

CHRISTOPHER, Analysis Factors Influencing Effectiveness of Original Earnings Management of District (PAD) at Duty Earnings of District of Regency Malinau under tuition of Ms. Prof. Dr. Hartutiningsih, MS. And mr Drs. H. Syahrani, M.Si.

Problems Proposed in this research what performance aparatur, interest administratur, medium and prasarana and observation have an effect on significant to Effectiveness of Management of District (PAD) at Duty Earnings of District of Regency Malinau and among the variable namely performance aparatur, interest administratur, medium and prasarana and observation manakah owning dominant influence to Effectiveness of Management of District (PAD) at Duty Earnings of District of Regency Malinau.

Result of research indicate that in simultan of variable of performance aparatur, interest administratur, medium and prasarana and observation have an effect on in signifikan to Efektivness of Management of District (PAD) at Duty Earnings of District of Regency Malinau. Condition of such as this shown by value R of equal to 0,876 which the value come near 1. value of coefficient Determinant of equal to 0.768 or 76,8 % explaining that variable proposed in this research model earn to measure or deputize 76.8 % variable influencing Efektivness of Management of District (PAD) at Duty Earnings of District of Regency Malinau, while the rest 23.2 % influenced by other dissimilar variable is which is not proposed in this research. Result of test F obtained by

equal to 32,230 with storey:level significant 0,000.

From result of calculation of SPSS Version 12.0 for windows obtained by result of the following coefficient regresi :

$$Y = 1,533 + 0,384 X_1 + 0,208 X_2 + 0,911 X_3 + 0,508 X_4$$

In parcial of variable of performance aparatur, and medium and prasarana and observation own influence which enough signifikan to Efektivness of Management of District (PAD) at Duty Earnings of District of Regency Malinau, with value of coefficient regrestion of equal to 0,384, 0,911 and 0,508. Through test t obtained by value $t_{\text{calculate}}$ each 2,109, 10,761, and 4,740. While variable of interest administratur do not have an effect on in signifikan to effectiveness of management of District (PAD) in Duty Earnings of District of Regency Malinau, this matter seen from value of coefficient regresi of equal to 0,208 and assess t of equal to 1,316 smaller than value of t_{table} of equal to 1.6820.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah memiliki beberapa perubahan mendasar bagi daerah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut : *Pertama*, Sumber-Sumber Keuangan daerah sejalan dengan perinsip desentralisasi daerah akan diberikan sumber-sumber keuangan yang besar. *Kedua*, Kewajiban Minimal, Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk memberikan alokasi dana pada daerah, sekurang kurangnya 25 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Dan *Ketiga*, Nuansa Pemerataan, untuk daerah-daerah yang miskin Sumber Daya Alam Pemerintah menetapkan dana perimbangan.

Penyerahan urusan kepada Pemerintah daerah bukan semata-mata proses administrasi, tetapi juga proses politik karenanya pemberian pemberian otonomi kepada daerah lebih ditekankan kepada

dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di daerah, terutama peran serta masyarakat dalam pemerintahan serta pemberdayaan (*empowerment*) kapasitas lokal. Dengan demikian desentralisasi merupakan perangkat untuk menumbuhkembangkan kemandirian daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Melaksanakan pembangunan yang lebih merata di seluruh daerah, pemerintah mengusahakan adanya keserasian laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Hal ini merupakan usaha untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah meningkatkan kinerja yang optimal serta diimbangi dengan semakin meningkatnya upaya-upaya efisiensi.

Didalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur serangkaian kebijakan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, desentralisasi otonomi daerah merupakan bagian dari salah satu kebijakan kemandirian suatu bangsa dalam mengurus daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah sebagaimana dimaksud adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sesuai dengan keadaan, kemampuan daerah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini kebijaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) selalu dikaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah untuk menerima suatu hak otonomi.

Diseralikannya beberapa urusan pemerintah pusat kepada daerah, maka sebagai pemerintah daerah yang otonom harus berusaha mencari dana pembiayaan dalam rangka mengurus kepentingannya. Hal

demikian menunjukkan bahwa harus berusaha untuk mewujudkan kemampuan untuk berkembang secara mandiri, dalam rangka pembiayaan pembangunan dan kebutuhan belanja pegawai. Akhir-akhir ini berkembang isu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, desentralisasi deregulasi, dan debirokratisasi, pemberdayaan sumber daya manusia yang diolah oleh berbagai ahli dilihat sebagai suatu perkembangan pemikiran mengenai pembangunan. Pemerintah merancang sampai kepada tingkat desa, sehingga pemerintah dan masyarakat pada tingkat daerah mempunyai wewenang dalam pembangunan, dan membatasi birokrasi pemerintah pusat baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintah dalam hal ini mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, telah diatur dalam RAPBD yang dianggarkan setiap tahun dalam hal ini pengaturan pengeluaran pemerintah terhadap hal-hal yang dianggap perlu dalam pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam perekonomian yang lebih luas, terjadi hubungan antar kegiatan ekonomi dan menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis. Bahkan jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan mata rantai disuatu sektor dan tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan sektor lainnya. Pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi di suatu daerah membawa dampak sosial yang multikomplek. Pertumbuhan yang terlalu cepat dan drastis juga bisa berakibat kurang baik pada perekonomian suatu daerah, akan tetapi dapat pula membawa perubahan struktur ekonomi dan percepatan recovery ekonomi, manakala penduduk yang ada dapat memberikan kontribusinya pada daerah itu sendiri.

Berbagai kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat disuatu daerah sudah barang tentu menggunakan berbagai sumber daya yang terdapat di daerah dimana kegiatan perekonomian tersebut berlangsung. Sumber-sumber daya ekonomi di suatu

daerah baik dari alam maupun dari berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah bukanlah barang bebas tetapi merupakan barang-barang ekonomis, artinya setiap penggunaannya diperlukan biaya. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai penguasa daerah akan meningkatkan sektor-sektor yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di suatu daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD suatu daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2005:75) dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau sebelum diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 64,42 milyar rupiah (sembilan bulan) menjadi 81,98 milyar rupiah atau meningkat sebesar 17,56 milyar rupiah. Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Malinau dalam tahun 2001 merupakan pengaruh langsung dari bertambahnya beberapa komponen sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (dana perimbangan).

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis perlu mengkaji Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisis nantinya akan dirangkum dalam suatu tesis yang diberi judul : *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau"*.

Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana prasarana dan pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau?
2. Apakah diantara variabel-variabel tersebut ada yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana prasarana dan pengawasan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau.
2. Menganalisis variabel-variabel kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana prasarana dan pengawasan yang berpengaruh dominan terhadap efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis dan teoritis, dapat memberikan kontribusi tentang konsep kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana dan prasarana dan pengawasan dalam hubungannya dengan efektivitas pengelolaan PAD, serta sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut atau yang sejenisnya. Disamping itu, memberikan kontribusi pemikiran kepada pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan konsep kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana dan prasarana dan pengawasan dalam hubungannya dengan efektivitas pengelolaan PAD.
2. Sebagai masukan dan acuan bagi Bupati selaku penentu kebijakan di daerah, agar lebih memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD agar dapat dicapai secara maksimal.

DASAR TEORI

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan sentral dalam mengembangkan dan mencapai sasaran-sasaran organisasi. adalah tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya.

Menurut Manullang (1994:14). Manajemen Sumberdaya Manusia dapat dirumuskan sebagai seni dan ilmu memperoleh, memajukan dan memanfaatkan tenaga kerja sehingga tujuan organisasi dapat direalisasikan secara berdayaguna sekaligus adanya kegairahan bekerja dari para pekerja.

Menurut Hasibuan (2003:1) menyatakan bahwa : "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan". Selanjutnya Siagian (2003:2) berpendapat bahwa : "Manajemen sebagai seni untuk memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain".

Menurut Barthos (1990) dalam Hasibuan (2003:3), menjelaskan bahwa "Manajemen Sumberdaya Manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri".

Terry dalam Hasibuan (2003: 3) memberikan definisi manajemen sebagai berikut : "*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources*". Definisi ini dapat diartikan bahwa Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai suatu perencanaan, pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pemeliharaan terhadap tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Aparatur

Kinerja adalah merupakan perwujudan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan

yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu kinerja merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi hal ini tidak mudah dicapai, karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang. Menurut Sianipar (1994:4), kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama periode waktu tertentu. Pengertian ini ada tiga aspek yang perlu dipahami setiap pegawai atau pimpinan suatu organisasi/ unit kerja, yakni : 1) Kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan/fungsi; 3) Waktu yang diperlukan menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Untuk mengukur hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, harus ditentukan dulu standar kinerja. Karena penilaian kinerja merupakan mekanisme yang penting bagi pimpinan untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Menurut Siswanto (2002:231) bahwa penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/penyelia untuk menilai kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode/waktu tertentu.

Untuk melakukan penilaian kinerja, dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode dalam penilaian. Selanjutnya Simamora (2001:501) mengemukakan beberapa metode, penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Metode penilaian kinerja keprilakuan, dimana para pegawai dapat dievaluasi berdasarkan standar-standar organisasional, atau mereka dievaluasi relatif dengan karyawan-karyawan lainnya.
2. Metode penilaian kinerja perbandingan personalia, adalah merupakan metode yang membandingkan kinerja seseorang dengan rekan-rekannya yang lain. Metode ini biasanya diselenggarakan dan metode ini bermanfaat untuk memutuskan pemberian kompensasi dan pemberian imbalan-imbalan organisasi.

3. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan, yaitu terfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran-sasaran kinerja di masa mendatang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Dalam Efektivitas Pengelolaan PAD

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur dalam pengelolaan PAD, Diason dan Wetherbe (1987) dalam Hasibuan (2003:54) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pada suatu organisasi, yaitu : kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana dan pengawasan. Pada dasarnya pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja atau prestasi kerja para individu dalam suatu organisasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok.

Dari masing-masing faktor tersebut di atas akan diuraikan secara berurutan berikut ini :

Kualitas Aparatur

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata kualitas yang ditulis dengan "kwalitas" diartikan "keadaan (baik - buruk) sesuatu benda". Ruky (2003:56-570) dalam bukunya menyatakan bahwa sebenarnya sangat sukar mencari definisi dari istilah kualitas yang "berbau ilmiah" apalagi bersifat "resmi" dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Masaaki Imai yang dikutip oleh Ruky (2003:56) dalam buku yang sama yaitu "istilah "kwalitas" atau mutu mempunyai arti yang berbeda-beda dan tidak seorangpun dapat menjelaskan apa sebenarnya mutu itu."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas ialah sesuatu yang dapat disempurnakan meliputi tingkat "pengetahuan", "kemampuan", dan "kemauan" yang dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. Melihat dari pengertian

kualitas tersebut, yang berkaitan dengan : "pengetahuan", "kemampuan", dan "kemauan" merupakan gambaran dari kualifikasi pegawai dalam manajemen sumber daya manusia.

Kompetensi Administrator

Pengertian kompetensi dijelaskan oleh W. Robert Houston dalam Supeno (1995:29) sebagai berikut : *Competence ordinarily is defined as adequacy for a task, or as possession of required knowledge, skill and abilities* atau dalam artian kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai, atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang).

Sedangkan A. Suhacnah Suparno (2001:29) mengatakan bahwa kompetensi dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan (kegiatan) dengan standar tertentu.

Menurut Rivai (2004:226) menjelaskan bahwa "Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu". Lanjut beliau menjelaskan bahwa kemampuan itu dibedakan menjadi :

1. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada tingkat pendidikan formal dan pendidikan kedinasan lainnya.
2. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan misalnya : pekerjaan yang keberhasilannya menuntut stamina kecekatan tangan, kekuatan atau bakat serupa manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seseorang karyawan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerja adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi, disamping itu juga sebagai salah satu faktor guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien.

Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian

sarana dan prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya proses manajemen. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1992 :184) bahwa faktor sarana dan prasarana yang diartikan sebagai peralatan adalah penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana yang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

Pendapat ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana harus dapat dipenuhi dan menjadi pendukung dalam usaha mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi sebagai suatu proses manajemen. Senada dengan hal itu, Soejadi (1993 : 82) juga menambahkan bahwa faktor sarana dan prasarana disamping manusia dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan, sasaran dan output konkrit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan

Menurut Halsey (1994:7) mengatakan bahwa : Pengawasan adalah memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan; menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pekerjaan itu telah dipahami dan dilakukan dengan wajar; mengadakan koreksi-koreksi; memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik dan akhirnya menyelaraskan setiap orang kedalam suasana kerjasama yang erat, semuanya itu dilakukan secara adil dan sabar, sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir teliti, cerdas, bersemangat dan sempurna.

Selanjutnya Abdurachman (1993:96) bahwa : Pengawasan merupakan kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki. Kemudian mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan tersebut sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan

diciptakan bukan untuk mencari kesalahan terhadap pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi justru untuk menciptakan kebenaran-kebenaran terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan.

Selanjutnya menurut Hadibroto (1985:2) pengawasan terdiri dari semua aktifitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai sampai berapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jelas bahwa pengawasan selalu berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana semula yang telah diterapkan. Dengan demikian hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Manifestasi desentralisasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 adalah penetapan titik berat otonomi daerah yang diletakkan pada Daerah Tingkat II (Pasal 11). Adapun yang dimaksud dengan titik berat otonomi pada daerah tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi daerah Tingkat II dengan perimbangan yang dinamis antara hak, wewenang, dan kewajiban bagi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk penyerahan sebagian urusan Pemerintah daerah Tingkat I Kepada Pemerintah daerah Tingkat II untuk menjadi urusan rumah tangganya secara bertahap dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir b dijelaskan bahwa "Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi untuk daerah Propinsi diberikan secara

terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Menurut Hoogerwef dalam Darumurti dan Rauta (2003:11) mengemukakan bahwa : Desentralisasi atau otonomi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka titik berat otonomi daerah Kabupaten dan daerah Kota dengan pertimbangan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan di daerah tentu memerlukan sumber-sumber pembiayaan melalui Pendapatan Asli Daerah, karena tanpa biaya tentu tidak mungkin bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu sumber pendaptan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Kusumah (2002:171) menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah, yaitu "Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku".

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kebijaksanaan dari penerimaan rutin mencakup :

1. Kebijakanaksanaan untuk mengusahakan peningkatan bantuan pemerintah pusat berupa subsidi pembangunan.
2. Kebijakanaksanaan dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah

Daerah selalu berusaha menggali sumber-sumber keuangan daerah yang tentu saja ditunjang oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah yang salah satu sumbernya adalah pajak daerah.

Menurut Bratakusumah Deddy Supriady (2002:173) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Penerimaan Daerah Desentralisasi sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.
- e. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh faktor keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengusahakan Pendaptan Asli Daerah.

Kaho (1997:126) menjelaskan komponen-komponen yang terdapat di dalam Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi daerah
- c. Hasil Perusahaan Daerah
- d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan sebagai usaha Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai daerah otonomi. Salah satu indikator kemandirian kabupaten kota dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembangunan adalah sejauh mana daerah dapat membiayai pengeluarannya sendiri. Kemampuan disisi akan tergantung pada tersedianya sumber-sumber sosio ekonomi, disisi lain adanya hak politik untuk mengontrol serta mengelola sumber-sumber bagi daerah.

Kemampuan daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana dapat diukur melalui (1) kemampuan daerah mengelola PAD guna membiayai pengeluaran rutin masing-masing (2) perbandingan antara PAD dengan PDRB non migas masing-masing daerah (3) Besar perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah sering disebut Indeks Kemampuan Daerah (IKR).

Memperhatikan uraian beberapa uraian di atas terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD dan faktor manajemen merupakan faktor yang paling dominan utama manajemen Dinas Pendapatan daerah sebagai koordinator maupun instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan PAD. Untuk mengelola penerimaan PAD diperlukan penerapan manajemen yang mantap utamanya pada Dinas Pendapatan Daerah dengan segala fungsinya.

Sumber Pembiayaan Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selalu memerlukan pembiayaan, sebab kegiatan apapun tidak akan terlaksana dengan baik

apabila tidak tersedia biaya ataupun anggaran anggaran yang cukup memadai (Soedjadi, 1995 : 69; Pramudji, 1980 : Kaho, 1997 : 125).

Sumber pembiayaan pembangunan menurut Rahardjo Adisasmita dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah (49-50) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Bersumber dari Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Tabungan Masyarakat
 - b. Tabungan Pemerintah
2. Bersumber dari Luar Negeri, terdiri dari :
 - a. pinjaman luar negeri
 - b. Bantuan Pembangunan Resmi
 - c. Penanaman Modal Asing

Pengukuran Efektivitas Organisasi

Konsep efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Secara umum konsep efektivitas merupakan konsep untuk mengukur produktivitas.

Menurut Solichin (1997:37) efektivitas diartikan sebagai perbandingan terbaik antara hasil dengan tujuan. Sementara itu Emerson dalam Handyaningrat (1984:16) efektivitas diartikan sebagai pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengukuran efektivitas dikemukakan oleh Campbell (1973) dalam Steer (1985:45) dalam 6 (enam) macam pertimbangan, sebagai berikut : *Pertama*, Pengukuran efektivitas untuk memastikan keadaan (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk. *Kedua*, Pengukuran efektivitas organisasi digunakan sebagai diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi. *Ketiga*, diperlukan sebagai bahan keputusan untuk suatu perencanaan. *Keempat*, diperlukan untuk memahami organisasi. *Kelima*, diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaa perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi. *Keenam*, diperlukan sebagai alat untuk memahami variabel, yaitu untuk mengetahui

karakteristik organisasi apa saja yang berhubungan dengan prediktor efektivitas.

Pengertian dan Penilaian Kinerja

Kinerja dalam Bahasa Inggris adalah *performance* yang menurut Gasperz (1998:287) *performance* adalah pemberian pelayanan yang produktif (efektif dan efisien) serta berkualitas berupa pengendalian terus menerus dari manajemen pemerintah sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

Sedangkan menurut Widjaya (1995:48) kinerja adalah prestasi kerja pegawai dan profesi pengembangan dimasa datang dilakukan dengan sistematis dan formal. Menurut Mustopadidaja (1993:3) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Di dalam Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999, dinyatakan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diartikan oleh Mustopadidaja (1998:4) adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Sedangkan laporan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk :

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

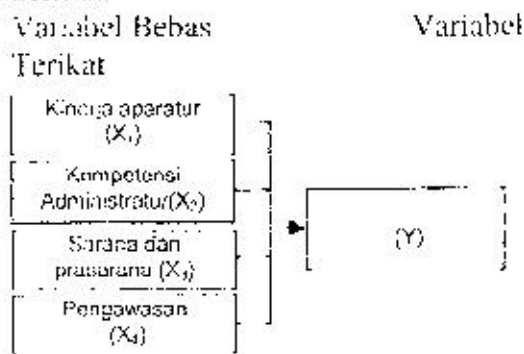
Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain sebagai berikut: (Mustopadidaja, 1999).

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhir metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Dan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), outcomes, manfaat dan dampak.

Kerangka Konseptual

Dari uraian permasalahan penelitian yang dikemukakan pada Bab 1, tinjauan terhadap penelitian terdahulu dan tinjauan

teoritis yang dibahas di muka, maka kerangka konseptual penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Hipotesis

1. Diduga secara bersama-sama maupun secara partial variabel kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana prasarana dan pengawasan, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan PAD di Kabupaten Malinau.
2. Diduga ada salah satu variabel yang berpengaruh dominan terhadap efektivitas pengelolaan PAD di Kabupaten Malinau.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini konsep yang dikemukakan dalam mengukur efektivitas pengelolaan PAD adalah menyangkut beberapa aspek, yaitu : kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana prasarana, dan pengawasan. Sedangkan efektivitas pengelolaan PAD diukur dari tingkat penerimaan. Berdasarkan konsep di atas maka ditetapkan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Variabel terikat (*dependen variabel*) dengan menggunakan lambang Y yang dalam hal ini Efektivitas Pengelolaan PAD.
2. Variabel bebas (*independen variabel*) dengan menggunakan lambang X yang terdiri dari :
 - X₁ = Kinerja Aparatur
 - X₂ = Kompetensi Administrator
 - X₃ = Sarana Prasarana
 - X₄ = Pengawasan

Definisi Operasional

Adapun batas pengertian atau definisi variabel dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas Pengelolaan PAD (Y), yaitu hasil penerimaan PAD dari masing-masing dinas/unit kerja yang ditugasi untuk melaksanakan pemungutan dan pengumpulan PAD, indikator-indikator variabel ini adalah :
 - a. Kontribusi PAD dalam APBD.
 - b. Target penerimaan
 - c. Perkembangan penerimaan PAD
2. Kinerja Aparatur (X₁), yaitu kemampuan yang dimiliki oleh aparatur untuk menyelesaikan/melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, indikator-indikator variabel ini adalah :
 - a. Kualitas pekerjaan
 - b. Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan
 - c. Jumlah dan banyaknya pekerjaan
3. Kompetensi Administrator (X₂), yaitu Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas administratif, perumusan kebijaksanaan, pemberian bimbingan serta pengelolaan kerja yang dimiliki, indikator-indikator variabel ini adalah :
 - a. Kemampuan melaksanakan pekerjaan
 - b. Tingkat pendidikan dan pelatihan
4. Sarana prasarana (X₃), yaitu menyangkut fasilitas yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor, indikator-indikatornya :
 - a. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan petugas lapangan
 - b. Ketersediaan pos-pos pengelolaan
 - c. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan di unit pengelola
5. Pengawasan (X₄), yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, indikator-indikatornya :
 - a. Sistem pengawasan
 - b. Volume pengawasan
 - c. Tindak lanjut pengawasan

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau yang terkait dengan pengelolaan atau penerimaan PAD. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau yang berjumlah 42 orang. Arikunto (200:125) menyatakan jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi 100 hingga 150 orang, dan dalam pengumpulan data menggunakan angket, sebaiknya diambil seluruhnya. Mengingat jumlah responden hanya berjumlah 44 orang, maka penelitian ini termasuk penelitian populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
- Kuisioner, yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada para responden yang diteliti.
- Wawancara. Yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi instansi tersebut.
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti semua dokumen atau catatan yang ada pada instansi tersebut yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis data penelitian yang mempunyai variabel lebih dari satu, maka digunakan alat analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana :

Y = Efektivitas Pengelolaan PAD

a = Konstanta

e = variabel pengganggu

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

x_1 = Kinerja Aparatur

x_2 = Kompetensi Administrator

x_3 = Sarana Prasarana

x_4 = Pengawasan

Uji Korelasi

Teknik korelasi yang digunakan adalah teori Karl Pearson (Pearson Product Moment) yang dirumuskan dalam hipotesis statistik adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum XY + \sum X \sum Y}{\sqrt{n\sum X^2} \sqrt{n\sum Y^2}}$$

Keterangan :

X : Skor Item

Y : Skor Total

r : Koefisien Korelasi

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam pengukuran data untuk kebutuhan analisis lebih lanjut perlu dilakukan pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian dan data yang diperoleh dari instrumen penelitian harus valid dan reliabel. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Sugiyono (1994:97) menjelaskan : "Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dan instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Lebih lanjut Sugiyono (1994:97) menjelaskan bahwa "dengan menggunakan instrumen yang valid akan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi, instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat utama untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel".

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian data untuk memperoleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, sehingga meyakinkan semua pihak bahwa penelitian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan

yang tinggi, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar riset dan pengembangan lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan proses pengolahan data yang berupa hasil kuisioner untuk kemudian dikuantitatifkan berdasarkan skala interval, dan dihitung atas dasar rata-rata untuk kemudian ditentukan tingkat validitas dan reliabilitasnya.

Dari data yang telah dihitung rata-ratanya, kemudian dimasukkan dalam satu tabel matrix tanggapan responden, untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan regresi berganda dengan menggunakan sistem komputer melalui program Statistical Package for Social Sciences 12.0.

Hasil pengolahan program SPSS tersebut akan menghasilkan print out regresi berganda, kemudian dengan teknik program yang sama diuji menggunakan uji F untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen, maupun uji t untuk pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat dibuktikan apakah hipotesis penelitian yang diajukan diterima atau ditolak.

Jika dalam perhitungan, hasil uji F pada tingkat signifikansi 5 % atau level of confidence 95 % diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$, ini berarti bahwa variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama memberikan pengaruh yang berarti pada variabel dependen. Sedangkan untuk menguji hipotesis apakah salah satu variabel independen mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel dependen (secara parsial) digunakan uji t, maka hipotesis kedua diterima kalau dalam tingkat signifikansi 5 % $t_{hitung} > t_{tabel}$

Pengujian Terhadap Asumsi Klasik

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model Regresi Linier Berganda dengan menganalisis data yang ada telah memenuhi asumsi klasik.

Gujarati (1999:157) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) penyimpangan asumsi klasik yang dapat terjadi dalam penggunaan regresi linier berganda yaitu terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila terjadi penyimpangan asumsi ini maka model yang digunakan tidak bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), dengan demikian dalam analisis hasil penelitian perlu diadakan deteksi ketiga asumsi tersebut di atas.

Uji multikolinieritas

Menurut Rietveld dan Sumary (1998:53) bahwa : Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak saling berelokasi atau ada hubungan linier di antara satu atau lebih variabel bebas tersebut. Rietveld dan Lasmomo menyebutkan, akibat adanya multikolinieritas maka sulit memisahkan pengaruh masing masing variabel bebas dan variabel tidak bebasnya.

Salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dilakukan analisis *Pearson* di antara variabel bebas. Jika tidak terdapat korelasi yang bermakna berarti tidak terjadi multikolinieritas. Adanya multikolinieritas juga dapat dideteksi dari nilai R^2 yang sangat tinggi antara 0,7 sampai 1,0 dan sementara pengujian terhadap variabel bebas menunjukkan hasil tidak signifikan.

Uji Autokorelasi

Menurut Algifari (1997:102) bahwa :Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pengujian dengan metode Durbin Watson yaitu dengan melihat angka Durbin Watson dengan hasil perhitungan. Kriteria untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian yang dikemukakan oleh Algifari bahwa bila angka Durbin Watson kurang dari 1,10 telah terjadi autokorelasi, sampai dengan 1,54 dikatakan tanpa kesimpulan, 1,55 sampai dengan 2,64 dinyatakan tidak ada autokorelasi, 2,46 sampai 2,90 dinyatakan tanpa kesimpulan, dan lebih dari 2,91 ada autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji residual residual yang ada agar terlihat apakah sebaran data berasal dari data yang normal atau tidak. Hal ini sangat penting dilakukan dalam analisis statistik inferensial. Jika residual residual sebaran data didistribusikan dengan normal, maka harga residu yang muncul berada di atas atau di bawah garis lurus 0,00.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini, seperti yang dirumuskan di dalam bab II, maka dipergunakan metode analisis regresi berganda. Analisis ini dipergunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam model sebab akibat yang telah dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teoritis. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi program SPSS 12.0 for Windows dapat diketahui bahwa secara simultan variabel kinerja aparatur, variabel kompetensi administrator, variabel sarana dan prasarana, dan variabel pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,876 yang mana nilai tersebut mendekati 1.

Nilai Koefisiensi Determinasi yang ditunjukkan pada tabel 5.1, sebesar 0,744 atau 74,4 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 74,4 % faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD sedang sisinya 25,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam model penelitian ini.

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 12.0 for windows diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,533 + 0,384 X_1 - 0,208 X_2 + 0,911 X_3 + 0,508 X_4$$

Hasil ini menunjukkan bahwa :

Variabel X_1 memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,384 yang berarti bahwa setiap variabel kinerja aparatur mengalami peningkatan 1

satuan maka akan memberikan efek positif sebesar 0,384 kepada variabel efektivitas pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Variabel X_2 memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,208 yang berarti bahwa setiap variabel kompetensi administrator mengalami peningkatan 1 satuan maka akan memberikan efek positif sebesar 0,208 kepada variabel efektivitas pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Variabel X_3 memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,911 yang berarti bahwa setiap variabel sarana dan prasarana mengalami peningkatan 1 satuan maka akan memberikan efek positif sebesar 0,911 kepada variabel efektivitas pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Variabel X_4 memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,508 yang berarti bahwa setiap variabel Pengawasan mengalami peningkatan satu satuan maka akan memberikan efek positif sebesar 0,508 kepada variabel efektivitas pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Pembahasan

Dari hasil analisis sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum kerangka teoritis yang dipakai sebagai dasar dalam perumusan hipotesis telah dipotong dengan data empiris, yang menyatakan bahwa secara simultan variabel variabel kinerja aparatur (X_1), kompetensi administrator (X_2), sarana dan prasarana (X_3), dan pengawasan (X_4) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan variabel variabel kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana dan prasarana, dan

pengawasan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel efektivitas Pengelolaan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,876 yang mana tersebut mendekati 1. Nilai Koefisien Determinasi yang ditunjukkan pada tabel 5.1. sebesar 0,768 atau 76,8 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 76,8 % faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, sedangkan sisanya 24,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis juga terlihat bahwa secara parsial variabel kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan variabel pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,384, 0,911 dan 0,508, melalui uji t diperoleh nilai t hitung masing masing 2,109, 10,761, dan 4,740 jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6820 maka terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan pengawasan terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Hal seperti ini dimungkinkan kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan pengawasan merupakan salah cara untuk mencapai tujuan dari pengelolaan PAD. Adapun variabel kompetensi administrator memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau akan tetapi tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,208 dan nilai uji sebesar 1,316 < dari nilai t_{tabel} sebesar 1,6820.

Jika kita melihat dan membandingkan arah pengaruh antara kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana dan prasarana, dan pengawasan, maka pengawasan yang memiliki hubungan kuat

dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara teoritis sesuai dengan nilai koefisien korelasi yang positif. Menurut Hasil penelitian ini bahwa sarana dan prasarana serta pengawasan sebagai suatu sistem yang harus diciptakan dalam suatu organisasi, yang merupakan fungsi dari pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja pegawai serta meluruskan kembali atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan kerja.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan kegiatan di Kantor. Sedangkan pengawasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam suatu organisasi (kantor). Karena apabila organisasi tanpa adanya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan sebagai fungsi kontrol maka rencana kegiatan yang telah direncanakan tidak akan dapat tercapai dengan baik bahkan akan menyimpang dari tujuan semula. Begitu juga dengan kinerja aparatur, tanpa kinerja dari aparatur, maka suatu kegiatan tidak mungkin dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara simultan variabel kinerja aparatur, variabel kompetensi administrator, variabel sarana dan prasarana, dan variabel pengawasan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Kondisi seperti ini ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,876 yang mana nilai tersebut mendekati 1. Nilai Koefisiensi Determinasi sebesar 0,768 atau 76,8 % menerangkan bahwa variabel yang dikemukakan dalam model penelitian ini dapat mengukur atau mewakili 76,8% faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan PAD sedang sisinya 23,2%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian ini.

2. Uji simultan (serempak) diketahui sebesar nilai F_{hitung} 32,230 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur, kompetensi administratur, sarana dan prasarana, dan pengawasan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.
3. Secara parsial variabel kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan variabel pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan PAD dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,384, 0,911 dan 0,508. Melalui uji t diperoleh nilai t hitung masing-masing 2,109, 10,761, dan 4,740 jika dibandingkan dengan t tabel (tingkat kepercayaan 95% uji dua sisi) sebesar 1,6820 maka terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel sehingga dapat diterangkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan pengawasan terhadap efektivitas Pengelolaan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Sedangkan variabel kompetensi administratur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, hal ini dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,208 dengan nilai uji t sebesar 1,316 lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Dari keempat variabel tersebut di atas terlihat bahwa variabel sarana prasarana memiliki pengaruh dominan karena memiliki nilai Coefisien beta sebesar 0,961 dan nilai signifikan 0,137 < 0,05.

Sarana-saran

1. Untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD, maka kiranya perlu terus diupayakan usaha untuk memberdayakan segenap potensi yang ada, terutama dengan lebih memberdayakan dinas/ unit kerja pengelolaan PAD dengan cara memberikan kesempatan yang lebih luas bagi dinas/ unit

kerja pengelolaan tersebut dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berkenaan dengan bidang tugasnya masing-masing. Hal ini penting mengingat selama ini sebagian besar dari Dinas/ Unit Kerja tersebut lebih bersifat sebagai instansi teknis pemberi pelayanan, daripada sebagai "penghasil" PAD. Disamping itu pemerintah daerah hendaknya dapat menetapkan target yang realistis bagi seluruh Dinas/ Unit Kerja pengelola PAD, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dinas/ Unit Kerja tersebut dalam meningkatkan PAD.

2. Perlunya mempertimbangkan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai pengelola PAD. Hal ini mengingat bahwa keberadaan pegawai yang mempunyai kemampuan manajerial yang berkenaan dengan pengelolaan PAD dan khususnya dalam bidang perpajakan masih sangat diperlukan. Upaya yang dapat ditempuh tidak saja dengan cara mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan keperluan, juga dapat dengan cara memberikan pelatihan secara menyeluruh bagi petugas pengelolaan agar terbentuk kesamaan persepsi tentang tugas yang harus dilaksanakan.
3. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Malinau, perlu mengambil langkah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung data base tentang obyek pajak dan prasarana beberapa kantor dinas pengelola PAD. Hal ini penting mengingat pemenuhan terhadap hal-hal tersebut akan memberikan kemudahan, kecepatan dan gairah dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1993. *Leadership Teori pembangunan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*. Bursa Buku Fisip Unmul, Samarinda.

- Adisasmita, H. Rabarjo, 2001, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Program Magister Keuangan Daerah, Unhas, Makassar.
- Arikunto, S., 1998, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, 2004, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Brata Kusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dessler, Gary, 1997, *Manajemen Personalia*, edisi ketiga, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Donai Djahjanuddin, 1992, *Efektivitas Organisasi (Tinjauan Teoritis)* FIA, Unibraw, Malang.
- Gujarati, Damodar, 1993, *Ekonometrika Dasar*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Halsey, George D., 1994, *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handyaningrat, Socwamo, 1984, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Cetakan Keenam, Haji masagung, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwa, 1997, *Prospek Otonomi di negara Republik Indonesia*, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasim, Azhar, 1993, *Pengukuran Efektivitas Organisasi*, UI Press, Jakarta.
- Kusumah, Brata, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lucas, Martin dan Wilson, Kim, 1992, *Memelihara Gairah Kerja : Psikologi Untuk "Orang Kantoran" Cet. Ketiga*. Alih Bahasa : Ansis Kleden, Arcan, Jakarta.
- Moch. Iehsan, 1998, *Pengembangan Administrasi Sebagai Ilmu dan Propesi Administrasi*, LP3ES, Jakarta.
- Muharram, 2003, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau*, Tesis, Program Magister Manajemen Univ. Mulawarman Samarinda.
- Rasyid, Ryaas M., 1998, *Desentralisasi Dalam Memnjang Pembangunan Daerah*, LP3ES, Jakarta.
- Santoso, 1995, *Evaluasi Peran Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Dati II Sleman*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Steer, Richard M., 1985, *Efektivitas Organisasi*, Seri manajemen No. 47, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke 3, Alfabeta, Jakarta.
- The Liang Gie, 1995, *Pertumbuhan di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wijaya, 2001, *Analisis Statistik Dengan Program SPSS 12.0*, Alfabeta, Bandung.
- Winardi dan Karchi Nisjar, 1997, *Manajemen Strategik*, mandar Maju, Bandung.